

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era modern ini penyelenggaraan pemerintah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam pemerintahan sendiri terdapat salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut dapat tercapai apabila manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik. Perubahan yang menyentuh keseluruhan aspek dalam siklus pengendalian manajemen di Pemerintah Daerah (Pemda) diantaranya terdapat pada Penganggaran (*budgeting*). Konsepsi anggaran yang berorientasi pada program dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Hal itu berarti penggunaan sejumlah dana tertentu telah mempunyai maksud dan tujuan yang diperlakukan serta disusun dalam suatu anggaran yang telah ditentukan.

Pengertian anggaran (*budget*) menurut Mahmudi (2007) adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (rupiah). Selain sebagai alat perencanaan kegiatan publik, anggaran sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Sistem pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis agar dapat berjalan dengan baik.

Pada hakekatnya, seluruh dana yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan dari suatu unit tertentu meliputi biaya-biaya yang dapat diklasifikasikan dalam bentuk objek pembelanjaan. dengan kata lain, jumlah biaya kegiatan sama dengan jumlah kinerja menurut objek pembelanjaan.

Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. Penyusunan APBD oleh setiap daerah di Indonesia merupakan wujud penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan anggaran.

Menurut Andrianto (2011) untuk menjamin agar APBD disusun dan dilaksanakan dengan baik, benar serta terdapat disiplin anggaran maka penyusunan anggaran harus mengacu pada aturan yang melandasinya yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. APBD setiap tahunnya disusun oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyusunan APBD pemerintah pusat menerbitkan peraturan yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD, salah satu aturan yang diterbitkan adalah Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). Berdasarkan aturan tersebut telah diuraikan jadwal dalam menyusun APBD yang berlaku bagi seluruh pemerintah di Indonesia.

Pada Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atau pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. Pengalokasian dana yang efektif mengandung arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan strategis yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis daerah. Sedangkan pengalokasian dana yang efisien mengandung arti bahwa pencapaian sasaran dan tujuan strategis tersebut telah menggunakan sumber daya yang paling minimum dengan mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan.

Menurut Chitra dan Taufiq (2010) dengan adanya peraturan mengenai jadwal Penyusunan APBD ternyata belum mampu untuk mengatasi fenomena yang tengah terjadi dalam penyusunan APBD di Indonesia. Fenomena tersebut turut mengundang perhatian karena fenomena ini terjadi di sebagian wilayah Indonesia terutama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Beberapa fenomena tersebut adalah mengenai masalah keterbatasan anggaran (*Budgeting*), ketidaktepatan perencanaan yang menyangkut dalam hal perkiraan (*forecasting*), kurangnya penguasaan teknologi pada tim penyusun RKA / DPA, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya dukungan legislatif dan keterlambatan dalam penyusunan APBD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah satuan Kerja Pemerintah Kota Semarang yang mewakili Wali Kota untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2008. Dalam penyusunan RKA / DPA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Semarang harus menerapkan *performance based budgeting* yaitu pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Sebisanya mungkin sistem penganggaran tidak menggunakan *traditional budgeting* sistem dimana cara penyusunan anggaran tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa saja.

Kelemahan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan *performance based budgeting*, yaitu pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Lemah kualitas SDM menyebabkan kurangnya pemahaman tim perencanaan SKPD mengenai indikator kinerja, sehingga pegawai sebatas melanjutkan apa yang telah disusun dalam dokumen anggaran baru tanpa melakukan evaluasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelumnya. (Menurut Cipta (2011))

Kurangnya dukungan dari pihak legislatif, dalam hal ini DPRD menjadi salah satu faktor belum berjalannya penerapan *performance based budgeting* dengan baik. (Menurut Cipta (2011)). Dalam pembahasan anggaran, anggota legislatif harusnya lebih memberikan perhatian terhadap kesesuaian kegiatan yang di muat dalam RKA. Namun, dalam pelaksanaannya justru lebih fokus pada rincian atau item belanja daripada indikator kinerja yang di cantumkan dalam RKA SKPD. Ketidaktepatan perencanaan dalam hal ini adalah mengenai kurang nya daya perkiraan (*forecasting*). Apabila daya prediksi dari tim penyusun RKA/DPA kurang baik maka rincian anggaran yang telah di buat bisa melenceng sehingga kebutuhan *urgent* atau barang yang harusnya di beli sesuai kebutuhan justru ada beberapa yang belum di penuhi dan justru kebutuhan lain yang belum masuk dalam rincian kegiatan sudah terpenuhi.

Keterlambatan penyusunan APBD akan berpengaruh pada perekonomian daerah dan terlambatnya pelaksanaan program Pemda, karena sebagian besar pendanaan program tersebut berasal dari APBD sehingga berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat. Menurut Chitra dan Irwan (2010) APBD yang terlambat di sahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat memberi peluang munculnya korupsi karena adanya usaha mengalihkan dana yang tersisa dari rekening program APBD ke rekening pribadi. Kurangnya penguasaan teknologi pada tim penyusun RKA / DPA mengharuskan Badan Kesbangpol untuk mencari staf ahli khusus teknologi informasi. Seluruh RKA SKPD di masukan di sebuah sistem web yaitu Simperda. Setiap proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan akan di masukan dalam sistem tersebut. Tim penyusun RKA / DPA harus di bekali dengan ilmu mengenai penguasaan teknologi agar proses penyusunan APBD dapat berjalan dengan lancar dan apabila ada pihak eksternal meminta data, mereka dapat menyediakan langsung melalui sistem Simperda.

Dari latar belakang tersebut, maka dalam tugas akhir ini mengambil judul ”Prosedur Penyusunan APBD pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang”.

1.2 Ruang Lingkup

Pembatasan Ruang Lingkup dalam Laporan sangat diperlukan untuk menghasilkan tulisan yang benar. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perluasan materi terhadap hal yang akan dibahas.

Masalah yang akan dibahas adalah mengenai Prosedur Penyusunan APBD pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, dengan ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

- a. Pengertian Prosedur dan penyusunan APBD pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- b. Fungsi APBD
- c. Proses penyusunan APBD
- d. Anggaran dan Realisasi
- e. Konsep Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- f. Tahapan Dalam Pengeluaran Belanja Daerah
- g. Hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam mencapai sumber daya yang efektif dan efisien

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui fungsi dan prosedur penyusunan APBD
- b. Memahami Anggaran dan Realisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- c. Mengetahui Konsep Bendahara Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

- d. Memahami Tahapan dalam pengeluaran Belanja Daerah
- e. Mengetahui hambatan dan kendala pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam mencapai sumber daya baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia yang efektif, efisien dan berkeadilan.

1.3.2 Manfaat Penulisan

- 1. Bagi Penulis
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai tugas dan kegiatan yang ada pada tiap-tiap bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan APBD yang digunakan Badan Kesbangpol.
 - c. Meningkatkan pengetahuan mengenai sistem *web basic* pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang merupakan aplikasi dari Pemendagri mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2. Bagi Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
 - a. Tambahan referensi mengenai keterkaitan antara prosedur penganggaran (*budgeting*) dan penyusunan APBD dalam mencapai keberhasilan program dan per kegiatan SKPD
 - b. Sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi kerja bagi pegawai khususnya tim penyusun RKA/DPA pada saat penganggaran APBD
- 3. Bagi Pengelola Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis
 - a. Sebagai sarana referensi kepustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan dapat meningkatkan kualitas lulusan yang baik.

4. Bagi Pembaca

- a. Tambahkan referensi mengenai keterkaitan antara penganggaran dan penyusunan APBD dalam mencapai keberhasilan suatu program dan kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- b. Memahami proses Tahapan Dalam Pengeluaran Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- c. Mengetahui kinerja pegawai Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam menyusun APBD dan sistem yang digunakan untuk mengaplikasikan Pemendagri mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4 Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi atau Pengamatan

Observasi yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu dengan mengamati secara langsung pekerjaan para pegawai di setiap bidang.

b. Studi Pustaka

Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan membaca hasil Tugas Akhir dari mahasiswa yang sudah wisuda, membaca buku-buku di perpustakaan, mengambil data dari internet, serta mengumpulkan beberapa jurnal untuk dianalisis.

c. Metode Interview / Wawancara

Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi empat bab, di dalam masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar dalam penulisan Tugas Akhir ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini berisi sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan unit kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK

Tinjauan teori dan tinjauan praktek berisi tentang ruang lingkup pembahasan prosedur penyusunan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Berisi rangkuman yang telah diuraikan pada Bab III dan kesimpulan yang terkait dengan topik yang ditulis.